BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kebijakan pengembangan pendidikan Islam di Patani masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha pada tahun 2016-2019 dapat kebijakan pendidikan Islam di Patani Thailand selatan ada 3 kebijakan dalam satu priode ini yaitu; kebijakan kurikulum, kebijakan pengembangan bahasa Thai dan kebijakan pengembangan guru dan tenaga kependidikan dikarana kebijakan ini yang terkait dengan pendidikan Isalm di Patani Thailand Selatan, sebagai berikut ini:

1. **kurikulum**

kebijakan kurikulum pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan terdapat kurikulum pendidikan Islam fardhu'in tingkat Ibtidaiyah atau tingkat awal pada tahun 2016/1437 H. di Pusat Pendidikan Islam Masjid Tadika di tahun akademik 2016. Bertujuan untuk mengembangkan peserta didik dengan moralitas, etika, nilai-nilai, kesadaran, dan dapat hidup bahagia bersama orang lain di masyarakat dengan membiarkan siswa belajar tentang Islam. Kebijakan Pendidikan Islam diputuskan oleh Jenderal Suracheet Chaiyawong, kepala perwakilan khusus pemerintah dan Wakil Menteri Pendidikan Memberi kebijakan dan memantau perkembangan kualitas bahasa Thai di provinsi perbatasan selatan. Kebijakan kurikulum ini adalah Kebijakan yang terus menuruskan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 masih digunakan untuk proses pembelajaran di Pusat pendidikan Islam Masjid Tadika belum ada perubahan kurikulum sebagai perubahan baru.

2. Pengembangan Basaha Thai

Kebijakan Penegembangan bahasa Thai untuk meningkatkan hasil belajar siswa selatan dan untuk menggunakan bahasa Thai dengan benar dan memahami materi pembelajaran untuk meningkatkan potensi siswa dan meningkan potensi siswa Thailand dalam era globalisasi 4.0, dan untuk meningkatkan hasil ujian nasioanl atau dipanggil O-NET (*Ordinary National Education Test*) dan I-NET (*Islamic National Educational Test*) bagi siswa yang dari daerah selatan Thailand.

Wakil Menteri Kementrian Pendidikan, mengungkapkan bahwa semua dimensi O-NET dan I-NET telah meningkat dengan ada kebijakan pengembangan Bahasa Thai sudah ada 125 Sekolah perbatasan selatan menyelenggarakan "Minggu Bahasa Thai" untuk menjaga kewarganegaraan Thailand bersama, telah mengungkapkan "siswa-siswa", yang mengikuti perkembangan kualitas di setiap dimensi. Setelah mendirikan pusat pengembangan untuk pengajaran dan pembelajaran di semua bidang bersamaan dengan pelatihan untuk para pemimpin guru menghasilkan skor O-NET dan I-NET yang ditingkatkan.

Kebijakan pengembangan bahasa Thai menjadi kebijakan terus menerus dari sejak Patani dijajah oleh Siam (Thailand) berdasarkan wilayah, Patani dikuasai oleh kerajaan Thailand, pihak kerajaan Thailand terus mengadakan kebijakan pengembangan bahasa Thai di wilayah Patani tersebut agar rakyat Patani memahami bahasanya. Hingga masa pemerintah perdana Menteri Pra’yut Chan’Ocha ini tetap di menuruskan kebijakannya.

3. Pengembangan guru dan tenaga kependidikan

Kebijakan pengembangan guru dan tenaga kependidikan untuk mengembalikan para guru ke kelas, kembalikan waktu tugas resmi untuk guru dan tenaga kependidikan dengan mengubah model pengembangan guru dan tenaga kependidikan dalam format baru ini "Perkembangan guru dan tenaga kependidikan dengan mematuhi misi dan area kerja sebagai basis online *(Teachers andEducational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors :TEPE Online)"* dengan mematuhi misi dan tugas operasional sebagai dasar sistem online (TEPE Online), memberikan kepada guru dan tenaga kependidikan dapat belajar dan mengembangkan diri di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka sendiri. Untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih lanjut.

Kebijakan pengembangan guru dan tenaga kependidikan adalah kebijakan yang terus menerus dari tahun 2015 hingga masa pememrintah perdana pra'yut Chan'Ocha tahun 2016 sampai tahun 2020 masih meneruskan kebijakan. Guru dan tenaga kependidikan setuju dengan pengembangan inovasi jaringan pembelajaran online (internet) karena itu sesuai dengan konteks area yang mengalami situasi kerusuhan bepergian beresiko karena itu, menghindari perjalanan yang tidak perlu akan membuat guru lebih aman.

Dari tiga kebijakan pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan tersebut atau kebijakan saat ini dengan kebijakan sebelumnya lebih baik dari yang

sebelumnya, karana pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'Ocha ini lebih mengarahkan kepada pendidikan banyak ambil perhatian kepada siswa/pelajar di Thailand Selatan dan juga diperintah khusus seorang petugas dari departemen pendidikan untuk manajemen mengarah pendidikan Thailand Selatan yaitu Jenderal Surachet Chaiwong, Wakil Menteri Pendidikan.

B. Saran-Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

   Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian serupa diharapkan dapat lebih banyak yang memperhatikan dalam kebijakan pendidikan Islam sehingga hasil yang didapat lebih baik dan mendalam.

2. Secara praktis

   Bagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan pendidikan Islam terus menerus sesuai dengan keadaan masyarat Pluralisme, karena kebijakan tersebut dianggap dapat memberikan bantuan layanan pendidikan serta siswa dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi dan kebijakan pendidikan Islam di tiga wilayah perbatasan selatan dapat memberikan bantuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang berdampak pada tiga wilayah perbatasan selatan Thailand melalui pendidikan.